

LAPORAN HASIL PENELITIAN

ANALISIS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI PULAU RINCA KECAMATAN KOMODO NUSA TENGGARA TIMUR

Klaster:
TERAPAN NASIONAL

Peneliti :
Ratnasari Fajariah Abidin, S.H., M.H. Dkk.

Sumber Pendanaan BOPTN
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tahun 2019

RINGKASAN PENELITIAN

1. Latar Belakang

Pulau Rinca menjadi bagian penting dari pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK) Komodo. Posisi Pulau Rinca yang berdekatan dengan Pulau Komodo dan keberadaan Komodo di Pulau ini, menjadikan Pulau Rinca bagian yang penting dalam pengelolaan TNK. Pulau Rinca yang secara administratif berda dalam Wilayah Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo, yang dihuni oleh sekitar 1.557 Kepala atau sekitar 386 Kepala Keluarga¹. Selama ini Pulau Rinca menjadi penopang bahkan menjadi penyangga utama dari Pengelolaan Pariwisata di TNK selain Pulau Komodo.

Komodo sebagai bagian dari destinasi wisata dunia, daya tarik objek wisata Indonesia memukau para pelancong dari berbagai belahan dunia. Data Badan Pusat statistik menunjukkan secara akumulatif tidak kurang 4.577.510² orang wisatawan asing telah berkunjung ke Indonesia dalam rentang waktu tahun 2015, 35% adalah wisatawan yang berkunjung ke TNK. Industri pariwisata di tanah air telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan ekonomi masyarakat, terutama dengan semakin berkembangnya industri-industri pendukung pariwisata, seperti sektor akomodasi, restoran dan fasilitas publik lainnya.³ Perkembangan pariwisata semestinya dapat memberikan kontribusi positif pada kertilbatan masyarakat, lebih khusus yang berdampak kepada perbaikan ekonomi masyarakat..

Pembangunan merupakan proses *sustainable development* sebagai suatu perubahan yang di dalamnya pemanfaatan sumber daya, investasi, pengembangan teknologi, dan restrukturisasi kelembagaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.⁴

¹ Data diambil dari hasil Wawancara Dengan Bpk H. Mukhtar Kepala Desa Pari Panjang, Pada Tanggal 25 September 2019 di Kampung Rinca Pulau Rinca. Data sudah disinkronkan dengan hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Kantor Kecamatan Komodo, Pada Tanggal 26 September 2019 di Labuan Bajo.

² Berita Resmi Statistik No.58 /09/Th.XV, 3 September 2015

³ Yusak Anshari, *Manajemen Strategi Hotel (Strategi Meningkatkan Inovasi dan Kinerja)*, (Surabaya: ITS Press, 2010), hal 1. Lihat juga Prof. Jan Hendrick Peters dkk, *Hospitality in Motion State The Art on Service Management*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 5

⁴ Drajat Tri Kartono, Modul Teori dan Konsep Pembangunan

Pembangunan kesejahteraan masyarakat sejatinya adalah melakukan pemberdayaan dan meminimalkan angka kemiskinan dalam masyarakat.⁵ Pemberdayaan masyarakat memiliki relevansi yang kuat dengan perubahan sosial baik pada tingkat lokal maupun global. Karena ketidak berdayaan masyarakat akan menghambat kemampuan suatu bangsa menghadapi persaingan global. Pemberdayaan sebagaimana yang dijelaskan dalam pedoman umum program pemberdayaan masyarakat, menganut prinsip demokrasi, keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, keterlibatan perempuan, kesinambungan, dan partisipasi masyarakat.⁶

Program pembangunan terutama bagi kepentingan pengembangan pariwisata TNK, hingga akhir 2017 pembangunan terkesan sangat stagnan bahkan cenderung tidak berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam lingkup masyarakat Pulau Rinca. Keterlibatan masyarakat sangat rendah, bahkan motivasi masyarakat sangat rendah untuk mengolah lebih besar potensi lokal yang ada, lebih khusus lagi untuk ikut serta mendukung perkembangan program pariwisata yang sedang gencar dikembangkan di Manggarai Barat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji dan diuji, tidak hanya pada program pembangunan semata, akan tetapi juga pada aspek partisipasi komunitas dalam pembangunan di wilayah pedesaan, dengan beberapa alasan; **Alasan Pertama**, Program pembangunan pedesaan menjadi bagian penting dalam seluruh program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014. **Alasan Kedua**, keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan menjadi tolak ukur penting keberhasilan sebuah proses pembangunan di pedesaan, bahwa pendekatan dalam pembangunan desa adalah Desa Membangun dan Membangun Desa, maka mencermati keterlibatan masyarakat ini dalam rangka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengupayakan kesejahteraan sebagai salah satu tujuan penting dari pembangunan. **Alasan Ketiga**, dari program pembangunan yang dilakukan di wilayah pedesaan yang melibatkan masyarakat, perlu dilihat seberapa besar gerakan ini dapat bertahan dalam upaya pembangunan masyarakat khususnya di Desa Pasir Panjang Pulau Rinca Kabupaten Manggarai Barat.

⁵ Soeharto Edy, *Memabangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2005), p. 16

⁶ Team Penyusunan, *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta; BAPENAS, 2001)

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat?
2. Mengapa tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Rendah?
3. Beberapa faktor yang mendukung dan penghambat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat?

3. Tujuan

Sesuai dengan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini, maka berikut ini adalah beberapa tujuan dari penelitian;

- 1) Memberikan diskripsi mengenai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat
- 2) Menjelaskan alasan-alasan yang melatar belakangi rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat
- 3) Menjelaskan beberapa faktor mendukung dan penghambat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat

4. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Pada umumnya Pemerintah, dalam mencanangkan pembangunan lebih cenderung eksklusif dan top down, sehingga memberikan kesan bahwa pembangunan yang dilakukan lebih cenderung tidak berpihak kepada masyarakat di mana pembangunan itu dilaksanakan. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat perlu ditumbuhkan melalui dibukanya akses yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung pada wilayah-wilayah lokal. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi seluruh masyarakat untuk secara sukarela menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam sebuah proses pembangunan. Partisipasi perlu lebih diperjelas sebagai upaya

pemerataan keterlibatan masyarakat, baik fisik, materiil, maupun moril dalam pembangunan. Woolock dan Narayan, menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi dalam komunitas. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari solidaritas dan kesadaran serta tanggungjawab masyarakat akan pentingnya pembangunan bagi upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat.⁷

Secara umum terkait dengan pemberdayaan masyarakat, penelitian dan tulisan terkait dengan topik ini telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sedangkan khusus yang berkenaan langsung dengan aspek gerakan perempuan dari kelompok keagamaan masih sangat jarang. Salah satu yang berdekatan adalah apa yang pernah dilakukan dan ditulis oleh Khumaidi (staf Pengajar pada Balai Diklat Depdagri Malang). Khumaidi melakukan kajian terkait dengan PERAN ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PEREMPUAN BERBASIS MODAL SOSIAL, kajian ini melihat seberapa besar peran lembaga keagamaan dalam pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada kelompok perempuan dan modal sosial. Kajian ini menyimpulkan bahwa PKMAS Perempuan memiliki peranan yang cukup penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat, namun dalam penelitian ini tidak ditemukan kesimpulan mengenai posisi agama dalam pemberdayaan masyarakat.⁸

Selain itu beberapa penelitian yang terkait dengan program pembangunan masyarakat juga pernah dilakukan oleh Abdul Mujib dkk, kajian yang dilakukan adalah melihat seberapa OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI MASJID DI WILAYAH PERKOTAAN YOGYAKARTA BAGI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Kajian dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) ini mengantarkan pada satu kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dapat digerakkan melalui kesamaan tujuan dan pandangan keagamaan dengan pendekatan lembaga keagamaan yaitu masjid, dalam konteks kelembagaan inilah masyarakat dapat mengambil

⁷ M. Woolock dan D. Narayan, "Social Capital: Implementation of Development Theory Research dan Policy" dalam Jurnal Research and Observer, Vol 5 No. 2 Tahun 2000, p. 225-250

⁸ Khumaidi, "Peran Organisasi Keagamaan Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (POKMAS) Perempuan berbasis Modal Sosial", dalam Jurnal MUWAZAH Vol 3 No, 1 Tahun 2011, p. 373-384

peranan yang cukup besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan.⁹

Penelitian yang terkait langsung dengan Partisipasi masyarakat yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Ni Made Ayu Andriani dkk dengan judul ; PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TUMOKANG BARU KECAMATAN DUMOGA UTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan diskriptif kualitatif memberikan kesimpulan peran masyarakat telah diberikan seluas-luasnya oleh pemerintah untuk ikut berpartisipasi. Namun kesempatan itu tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat akibat keenganan dan keterbatasan kemampuan dari masyarakat.¹⁰

Dari pelacakan dan penkajian yang telah dilakukan di atas, belum ditemukan kajian dan peneltian yang terkait dengan partisipasi masyarakat desa Rinca Manggarai Barat NTT tidak ditemukan.. Hasil peneltian ini menjadi penting khususnya untuk mendapatkan pola dan pendekatan dalam pembagunan untuk meminimalisir terjadinya resistensi dari masyarakat di mana permbangunan direncanakan.

Secara khusus kajian dalam penelitin ini dianalisis dengan menggunakan teori pembangunan ekonomi daerah, di mana kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehenship. Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Sebagai salah satu contoh dalam paradigma baru ini adalah bahwa komponen kesempatan kerja harus mengembangkan pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi penduduk lokal.¹¹ Dari kerangka teori ini, pembangunan daerah harus tunduk dan berdiri di atas kondisi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat akan semakin besar karena didukung oleh kondisi dan lokalitas masyarakat.

Sebagai sebuah kajian pembangunan masyarakat, maka penelitian ini juga menggunakan teori Community Development, di mana titik tumpu pembangunan adalah masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi ujung tombak, community-base service (Self reliance). Fokus pembangunan adalah internal masyarakat atau lingkungan komunitas. Kesadaran dalam keikut sertaan masyarakat mendukung perubahan struktur. Keterlibatan

⁹ Abdul Mujib dkk, “Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Melalui Masjid Di Wilayah Perkotaan Yogyakarta Bagi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” Laporan Penelitian 2010. Tidak diterbitkan

¹⁰ Ni Made Ayu Andriani dkk, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow” Laporan Penelitian, tidak diterbitkan

¹¹ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1999, p. 302

dan keikutsertaan pihak profesional dan prakarsa pihak luar komunitas akan sangat mendukung partisipasi publik dalam pembangunan.¹²

5. Kontribusi

Sejalan dengan tujuan dari penelitian ini, maka kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan kontribusi data terkait dengan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok pedesaan..
2. Penelitian ini memberikan kontribusi strategis bagi pengambil kebijakan khususnya terkait dengan pendekatan dalam pembangunan dan keterlibatan masyarakat guna memberikan hasil pembangunan yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat..

6. Metode

Secara umum penelitian ini menfokuskan pada program-program serta proses pelaksanaan pembangunan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat NTT.. Fokus penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan program-program serta proses pembangunan desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat NTT, alasan-alasan yang melatar belakangi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembanguan di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, faktor-faktor mendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus tetpancang atau *embanded case study*, penggunaan studi kasus terpancang ini dipilih mengingat bahwa fokus penelitian telah ditentukan di awal.¹³

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasir Panjang Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan tingkat pertumbuhan kelompok masyarakat dan partisipasinya dalam konteks pengembangan

¹² Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development; Community-Base Alternatives in an Age of Globalisation*., edisi terjemahan oleh Sastrawan Manulang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), p. 464

¹³ Robert K. Yin, *Case Study Research Design and Metod*, (London ; Sago Publication, 1987),

distinasi wisata TNK. Pembangunan distinasi pariwisata TNK belum mampu menggerakkan masyarakat khususnya Desa yang berada di Pulau Rinca untuk berpartisipasi secara intens dalam pembangunan.

Sesuai dengan fokus dari penelitian ini, maka sumber datanya adalah sebagai berikut; informan, informan awal dipilih secara purposive atas dasar pada subyek yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan judul, permasalahan, maupun fokus dari penelitian, informan selanjutnya didasarkan atas *snow ball sampling*, dan informan selanjutnya didasarkan pada tingkat kejenuhan dari informasi, dengan kata lain apabila tidak ada lagi variasi informasi yang diberikan oleh informan. Informan awal dari penelitian ini adalah dan tokoh masyarakat di mana lokasi penelitian ini dilakukan. Tempat dan peristiwa, meliputi lokasi penelitian, fasilitas yang tersedia, keadaan lingkungan dan alam. Keadaan sosial dan budaya maupun perilaku dan kejadian yang berkaitan dengan fokus dari penelitian ini. Dokumen yang terkait dengan fokus dan persoalan yang diteliti.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan tiga cara, ketiga cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), teknik wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan dilakukan secara lentur dan longgar, agar dapat menggali dan menangkap kejujuran informan dalam memberikan informasi yang benar.
2. Observasi, observasi dilakukan guna memperoleh data dan informasi mengenai social setting masyarakat di mana penelitian ini dilakukan. Dengan demikian diperoleh gambaran yang akan melengkapi diskripsi fokus kajian. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian.
3. Studi dokumentasi, studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari dokumen, arsip, dan berbagai laporan mengenai program-program pembangunan dan keterlibatan masyarakat.

Data dalam penelitian ini secara keseluruhan dilakukan ketika di lapangan maupun setelah data terkumpul. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah agar sistematis. Olahan dilakukan dengan menuliskan wawancara, hasil observasi, mengedit, mengklasifikasikan, dan mereduksi, menyajikan data dan menyimpulkan data. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis data interaktif. Proses analisis ini secara singkat akan

mengikuti tahapan sebagai berikut; data yang terkumpul direduksi berupa pokok-pokok temuan yang relevan dengan bahan penulisan, dan selanjutnya disajikan secara naratif. Reduksi dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan secara bersamaan dalam melakukan pengumpulan data. Proses selanjutnya adalah proses penarikan kesimpulan, dilakukan setelah proses pengumpulan data., yakni dilakukan setelah proses pengumpulan data, disajikan, didiskripsikan dan kemudiandiberi pemaknaan dengan interpretasi logis. Dengan proses ini sasaran akhirnya adalah untuk mendapatkan sejumlah makna.

7. Hasil

Prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam beberapa tahun terakhir hingga pada tahun 2020 yang akan datang adalah pariwisata. Pariwisata menjadi prioritas paling utama, terutama infrastruktur pendukung pariwisata. Beberapa tahun sebelumnya pembangunan Kabupaten Manggarai Barat terkonsentrasi pada infrastruktur pendukung industri pariwisata. Secara umum, pembangunan terkonsentrasi pada pengembangan bangunan fisik yang mendukung pariwisata dan kerangka aturan yang terkait dengan penyelenggaraan pariwisata, khususnya TNK.

TKN menjadi salah satu program andalan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini terlihat dari betapa total upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, baik Propinsi maupun Kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah Pemekaran tersebut. Sehingga pada periode ini pembangunan SDM dan masyarakat belum menjadi perhatian Pemerintah daerah.

Pembangunan dan pengembangan objek pariwisata TNK pada tahun 2017, tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada keterlibatan masyarakat yang berada dalam wilayah TNK. Hal ini cukup beralasan, karena konsentrasi pembangunan dan pengembangan baru diprioritaskan pada infrastruktur yang mendukung secara langsung pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di TNK. Pada Tahun ini jumlah total PAD Kabupaten Manggarai Barat masih sangat kecil, sehingga konsentrasi investasi dan pembangunan yang dilakukan adalah terkait dengan upaya peningkatan PAD secara langsung.

Pulau Rinca pada tahun ini belum, belum terlalu banyak tersentuh oleh pembangunan, kondisi fasilitas dan sarana publik masih sangat minim. Pulau ini pada tahun 2017 belum dialiri listrik PLN, ada listrik akan tetapi suadaya masyarakat dalam bentuk Jen-set dengan kapasitas tenaga yang sangat tidak memadai. Di pulau ini hanya ada dua lembaga pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Mengah Tingkat Pertama.¹⁴ Partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Pulau Rinca sangatlah rendah. Beberapa upaya yang dilakukan oleh masarakat secara suadaya adalah tenag listrik dan pemeliharaan lingkunagn melalui pembuatan jalan kampung dan suplay air bersih.¹⁵

Selama rentang waktu 2018 hingga pertengahan tahun 2019 angka perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan ini selanjutnya berdampak kepada program pembangunan di Kabupaten paling barat dari Propinsi Nusa Tenggara Timur ini. Anggaran belanja daerah yang terus ditingkatkan dan skala prioritas pengembangan dan pembangunan daerah yang terus diperkuat, khususnya untuk menggerakkan grafik kunjungan wisatawan di TNK. Salah satunya adalah bagaimana daerah-daerah yang terkait langsung dengan pengelolaan Pariwisata TNK. Desa Pasair Panjang yang berada di Pulau Rinca mendapatkan porsi yang cukup lumayan dengan pengembangan Pelabuhan Penyebrangan, sebagai pintu masuk pulau. Fasilitas Tenaga Listri yang Cukup memadai bagi masyarakat pulau.

Pada tahap pembagunan periode ini, keikutsertaan masyarakat meningkat sangat tajam, program-program yang diupayakan adalah berdasarkan musyawarah masyarakat. Musyawarah dilakukan secara hirarkis, yang dimulai dengan kelompok masyarakat terbatas, kemudian dalam lingkup Rukun Tetangga (RT) samapai kepada kelompok lebih besar yaitu musyawarah Desa. Program-program yang ingin dilakukan dan menjadi prioritas dibahas dalam sedemikian rupa. Hampir smua komponen masyarakat turut andil dalam program-program. Hasilnya menjadi sangat luar biasa, pola yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa Pasar Panjang dalam mengikutsertakan masyarakat dalam disain pembangunan Desa sangat efektif.

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, Pertama; rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah program-program yang dicanangkan tidak

¹⁴ Wawancara dengan Bpk Mustamin Tokoh Masyarakat Pulau Rinca, pada taggal 24 September 2109 di Rinca.

¹⁵ Wawancara dengan Bpk H. Mukhtar Kepala Desa Pasir Panjang di Pulau Rinca, pada tanggal 25 September 2019

sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa secara riil. Pola penyusunan program yang tidak melibatkan masyarakat. Kedua, keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan sangat terkait dengan strategi yang dikembangkan oleh pemerintah desa. Semakin luas keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program-program pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan desa. Ketiga

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang dengan ijinNya Laporan Penelitian ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penelitian Terapan Nasional ini berjudul “Analisis Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur”.

Penelitian ini penting dan strategis dalam rangka memotret dan memetakan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya di Desa Pasir Panjang Pulau Rinca Kecamatan Komodo.

Laporan ini menyajikan secara utuh keseluruhan aktifitas dan hasil dari pelaksanaan penelitian terapan nasional ini.

Kegiatan penelitian terapan nasional ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat dukungan yang besar dari banyak pihak, khususnya dari para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Camat dan seluruh bagian di Kantor Kecamatan Komodo yang berada di Labuan Bajo, serta Kepala Desa dan tokoh masyarakat Desa Pasir Panjang Pulau Rinca. Terlebih kepada Keluarga Bapak Mustamin dan Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menginap di rumah kolongnya.

Semoga temuan dan hasil kegiatan yang dilaporkan dalam Laporan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang peduli dengan upaya-upaya pelibatan masyarakat desa dalam pembangunan di pulau-pulau terpencil Indonesia.

Yogyakarta, 15 November 2019

Tim Peneliti

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan dilakukan sebagai sebuah upaya untuk menciptakan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang di amanatkan oleh dari UUD 1945, bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian pembangunan dalam kerangka kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum pembangunan dipahami sebagai sebuah proses perencanaan dan pengembangan sosial (social plan) yang diperankan oleh birokrasi bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memaui beberapa aspek pembangunan. Keterlibatan seluruh komponen menjadi syarat bagi terwujudnya pembangunan yang dimaksud. Selain dari pada itu pembangunan juga merupakan upaya untuk mendayagunakan potensi secara penuh. Sebagaimana yang dinyatakan pakar dan pemerhati lingkungan bapak Emil Salim, beliau menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses *sustainable development* sebagai suatu perubahan yang di dalamnya pemanfaatan sumber daya, investasi, pengembangan teknologi, dan restrukturisasi kelembagaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.¹⁶

Pembangunan kesejahteraan masyarakat sejatinya adalah melakukan pemberdayaan dan meminimalkan angka kemiskinan dalam masyarakat.¹⁷ Perberdayaan masyarakat memiliki relevansi yang kuat dengan perubahan sosial baik pada tingkat lokal maupun global. Karena ketidak berdayaan masyarakat akan menghambat kemampuan suatu bangsa menghadapi persaingan global.

Pemberdayaan sebagaimana yang dijelaskan dalam pedoman umum program pemberdayaan masyarakat, menganut prinsip demokrasi, keterbukaan atau transparansi,

¹⁶ Drajat Tri Kartono, Modul Teori dan Konsep Pembangunan

¹⁷ Soeharto Edy, *Memabangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2005), p. 16

akuntabilitas, mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, keterlibatan perempuan, kesinambungan, dan partisipasi masyarakat.¹⁸

Pemerintah baik pusat maupun daerah terus berupaya mendisain dan melaksanakan program-program bagi upaya pemberdayaan masyarakat dan menekan angka kemiskinan serta kesenjangan dalam masyarakat. Seluruh elemen masyarakatpun bahu membahu untuk ikut andil dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sebagai mana yang telah diamanatkan dalam pedoman umum program pemberdayaan masyarakat yang dikeluarkan oleh BAPENAS.

Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu Kabupaten dengan penduduk yang tersebar ke dalam beberapa wilayah yang luas bahkan ada yang berada pada pulau-pulau kecil, kendati menjadi salah satu dari daerah yang baru berkembang, karena merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Manggarai, kabupaten ini terus berkembang terutama dalam pembangunan pariwisata. Saat ini Kabupaten Manggarai Barat ini telah menjadi daerah yang diperhitungkan sebagai daerah tujuan pariwisata dunia dengan Pulau Komodo sebagai objek utama.

Kesejahteraan menjadi persolan utama bagi wilayah permekaran, kesejahteraan adalah bagian yang tak terpisahkan dari target pembangunan termasuk di Manggarai Barat. Pada beberapa desa dalam wilayah Kabupaten ini masih dijumpai kelompok masyarakat berada pada level pra-sejahtera, sejahtera I dan II. Kondisi ini selanjutnya menjadi perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan beberapa program, salah satunya adalah program *community development*, Program ini mencakup beberapa kegiatan yang diarahkan pada pengembangan potensi dan kemandirian masyarakat.

Desa Rinca menjadi salah satu desa yang tingkat kesejahteraannya masih sangat jauh dari harapan, secara geografis desa ini berada pada jalur utama objek wisata Pulau Komodo. Desa ini sekaligus penyanggah utama eksistensi wisata purba Pulau Komodo, namun program *community developmen* belum menjadi motor penggerak dalam perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Program-program yang telah dicanangkan selama ini belum secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi masyarakat pedesaan yang nota bene sebagai objek dari beberapa program pengemtasan kemiskinan. Program-program yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan yang pernah dilaksanakan

¹⁸ Team Penyusunan, ***Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat***, (Jakarta; BAPENAS, 2001)

antara lain Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), P4K, P4MI, JPS, UED-SP, KUBE, NTAADP, PIDRA, MFP-DFID, Raskin, BLT, Jamkesmas,

Program pembangunan selama ini terkesan sangat stagnan bahkan cenderung tidak berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam lingkup masyarakat desa Rinca. Keterlibatan masyarakat sangat rendah, bahkan motivasi masyarakat sangat rendah untuk mengolah lebih besar potensi lokal yang ada, lebih khusus lagi untuk ikut serta mendukung perkembangan program pariwisata yang sedang gencar dikembangkan di Manggarai Barat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji dan diuji, tidak hanya pada program pembangunan semata, akan tetapi juga pada aspek partisipasi komunitas dalam pembangunan di wilayah pedesaan, dengan beberapa alasan; **Alasan Pertama**, Program pembangunan pedesaan menjadi bagian penting dalam seluruh program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014. **Alasan Kedua**, keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan menjadi tolak ukur penting keberhasilan sebuah proses pembangunan di pedesaan, bahwa pendekatan dalam pembangunan desa adalah Desa Membangun dan Memabangun Desa, maka mencermati keterlibatan masyarakat ini dalam rangka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengupayakan kesejahteraan sebagai salah satu tujuan penting dari pembangunan. **Alasan Ketiga**, dari program pembangunan yang dilakukan di wilayah pedesaan yang melibatkan masyarakat, perlu dilihat seberapa besar gerakan ini dapat bertahan dalam upaya pembangunan masyarakat khususnya di Desa Rinca Kabupaten Manggarai Barat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana gambaran keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat?
- 2) Mengapa tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Rendah?
- 3) Beberapa faktor yang mendukung dan penghambat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat?

3. Tujuan

Sesuai dengan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini, maka berikut ini adalah beberapa tujuan dari penelitian;

- 1) Memberikan diskripsi mengenai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat
- 2) Menjelaskan alasan-alasan yang melatar belakangi rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat
- 3) Menjelaskan beberapa faktor mendukung dan penghabat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada umumnya Pemerintah, dalam mencanangkan pembangunan lebih cenderung eksklusif dan top down, sehingga memberikan kesan bahwa pembangunan yang dilakukan lebih cenderung tidak berpihak kepada masyarakat di mana pembangunan itu dilaksanakan. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat perlu ditumbuhkan melalui dibukanya akses yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung pada wilayah-wilayah lokal. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi seluruh masyarakat untuk secara sukarela menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam sebuah proses pembangunan. Partisipasi perlu lebih diperjelas sebagai upaya pemerataan keterlibatan masyarakat, baik fisik, materiil, maupun moril dalam pembangunan. Woolock dan Narayan, menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi dalam komunitas. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari solidaritas dan kesadaran serta tanggungjawab masyarakat akan pentingnya pembangunan bagi upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat.¹⁹

Secara umum terkait dengan pemberdayaan masyarakat, penelitian dan tulisan terkait dengan topik ini telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sedangkan khusus yang berkenaan langsung dengan aspek gerakan perempuan dari kelompok keagamaan masih sangat jarang. Salah satu yang berdekatan adalah apa yang pernah dilakukan dan ditulis oleh Khumaidi (staf Pengajar pada Balai Diklat Depdagri Malang). Khumaidi melakukan kajian terkait dengan PERAN ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PEREMPUAN BERBASIS MODAL SOSIAL, kajian ini melihat seberapa besar peran lembaga keagamaan dalam pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada kelompok perempuan dan modal sosial. Kajian ini menyimpulkan bahwa PKMAS Perempuan memiliki peranan yang cukup penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat, namun

¹⁹ M. Woolock dan D. Narayan, "Social Capital: Implementation of Development Theory Research dan Policy" dalam Jurnal Research and Observer, Vol1 5 No. 2 Tahun 2000, p. 225-250

dalam penelitian ini tidak ditemukan kesimpulan mengenai posisi agama dalam pemberdayaan masyarakat.²⁰

Selain itu beberapa penelitian yang terkait dengan program pembangunan masyarakat juga pernah dilakukan oleh Abdul Mujib dkk, kajian yang dilakukan adalah melihat seberapa OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI MASJID DI WILAYAH PERKOTAAN YOGYAKARTA BAGI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Kajian dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) ini mengantarkan pada satu kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dapat digerakkan melalui kesamaan tujuan dan pandangan keagamaan dengan pendekatan lembaga keagamaan yaitu masjid, dalam konteks kelembagaan inilah masyarakat dapat mengambil peranan yang cukup besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan.²¹

Penelitian yang terkait langsung dengan Partisipasi masyarakat yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Ni Made Ayu Andriani dkk dengan judul ; PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TUMOKANG BARU KECAMATAN DUMOGA UTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan diskriptif kualitatif memberikan kesimpulan peran masyarakat telah diberikan seluas-luasnya oleh pemerintah untuk ikut berpartisipasi. Namun kesempatan itu tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat akibat keenganan dan keterbatasan kemampuan dari masyarakat.²²

Dari pelacakan dan penkajian yang telah dilakukan di atas, belum ditemukan kajian dan penelitian yang terkait dengan partisipasi masyarakat desa Rinca Manggarai Barat NTT tidak ditemukan.. Hasil penelitian ini menjadi penting khususnya untuk mendapatkan pola dan pendekatan dalam pembangunan untuk meminimalisir terjadinya resistensi dari masyarakat di mana pembangunan direncanakan.

²⁰ Khumaidi, “Peran Organisasi Keagamaan Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (POKMAS) Perempuan berbasis Modal Sosial”, dalam Jurnal MUWAZAH Vol 3 No, 1 Tahun 2011, p. 373-384

²¹ Abdul Mujib dkk, “Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Melalui Masjid Masjid Di Wilayah Perkotaan Yogyakarta Bagi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” Laporan Penelitian 2010. Tidak diterbitkan

²² Ni Made Ayu Andriani dkk, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow” Laporan Penelitian, tidak diterbitkan

Secara khusus kajian dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori pembangunan ekonomi daerah, di mana kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Sebagai salah satu contoh dalam paradigma baru ini adalah bahwa komponen kesempatan kerja harus mengembangkan pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi penduduk lokal.²³ Dari kerangka teori ini, pembangunan daerah harus tunduk dan berdiri di atas kondisi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat akan semakin besar karena didukung oleh kondisi dan lokalitas masyarakat.

Sebagai sebuah kajian pembangunan masyarakat, maka penelitian ini juga menggunakan teori Community Development, di mana titik tumpu pembangunan adalah masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi ujung tombak, community-base service (Self reliance). Fokus pembangunan adalah internal masyarakat atau lingkungan komunitas. Kesadaran dalam keikutsertaan masyarakat mendukung perubahan struktur. Keterlibatan dan keikutsertaan pihak profesional dan prakarsa pihak luar komunitas akan sangat mendukung partisipasi publik dalam pembangunan.²⁴

²³ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1999, p. 302

²⁴ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development; Community-Base Alternatives in an Age of Globalisation*., edisi terjemahan oleh Sastrawan Manulang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), p. 464

BAB III DISAIN DAN METODE PENELITIAN

1. Kerangka Teori

Secara khusus kajian dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori pembangunan ekonomi daerah, di mana kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Sebagai salah satu contoh dalam paradigma baru ini adalah bahwa komponen kesempatan kerja harus mengembangkan pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi penduduk lokal.²⁵ Dari kerangka teori ini, pembangunan daerah harus tunduk dan berdiri di atas kondisi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat akan semakin besar karena didukung oleh kondisi dan lokalitas masyarakat.

Sebagai sebuah kajian pembangunan masyarakat, maka penelitian ini juga akan menggunakan teori Community Development, di mana titik tumpu pembangunan adalah masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi ujung tombak, community-base service (Self reliance). Fokus pembangunan adalah internal masyarakat atau lingkungan komunitas. Kesadaran dalam keikutsertaan masyarakat mendukung perubahan struktur. Keterlibatan dan keikutsertaan pihak profesional dan prakarsa pihak luar komunitas akan sangat mendukung partisipasi publik dalam pembangunan.²⁶

2. Metode Penelitian

Secara umum penelitian ini menfokuskan pada program-program serta proses pelaksanaan pembangunan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat NTT. Fokus penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan program-program serta proses pembangunan desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat NTT, alasan-alasan yang melatar belakangi

²⁵ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1999, p. 302

²⁶ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development; Community-Base Alternatives in an Age of Globalisation*., edisi terjemahan oleh Sastrawan Manulang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), p. 464

rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, faktor-faktor mendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus terpancang atau *embanded case study*, penggunaan studi kasus terpancang ini dipilih mengingat bahwa fokus penelitian telah ditentukan di awal.²⁷

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasir Panjang Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan tingkat pertumbuhan kelompok masyarakat dan partisipasinya dalam konteks pengembangan destinasi wisata TNK. Pembangunan destinasi pariwisata TNK belum mampu menggerakkan masyarakat khususnya Desa yang berada di Pulau Rinca untuk berpartisipasi secara intens dalam pembangunan.

Sesuai dengan fokus dari penelitian ini, maka sumber datanya adalah sebagai berikut; informan, informan awal dipilih secara purposive atas dasar pada subyek yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan judul, permasalahan, maupun fokus dari penelitian, informan selanjutnya didasarkan atas *snow ball sampling*, dan informan selanjutnya didasarkan pada tingkat kejenuhan dari informasi, dengan kata lain apabila tidak ada lagi variasi informasi yang diberikan oleh informan. Informan awal dari penelitian ini adalah dan tokoh masyarakat di mana lokasi penelitian ini dilakukan. Tempat dan peristiwa, meliputi lokasi penelitian, fasilitas yang tersedia, keadaan lingkungan dan alam. Keadaan sosial dan budaya maupun perilaku dan kejadian yang berkaitan dengan fokus dari penelitian ini. Dokumen yang terkait dengan fokus dan persoalan yang diteliti.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan tiga cara, ketiga cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), teknik wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan dilakukan secara lentur dan longgar, agar dapat menggali dan menangkap kejujuran informan dalam memberikan informasi yang benar.
2. Observasi, observasi dilakukan guna memperoleh data dan informasi mengenai social setting masyarakat di mana penelitian ini dilakukan.

²⁷ Robert K. Yin, *Case Study Research Design and Method*, (London ; Sago Publication, 1987),

Dengan demikian diperoleh gambaran yang akan melengkapi diskripsi fokus kajian. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

3. Studi dokumentasi, studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari dokumen, arsip, dan berbagai laporan mengenai program-program pembangunan dan keterlibatan masyarakat.

Data dalam penelitian ini secara keseluruhan dilakukan ketika di lapangan maupun setelah data terkumpul. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah agar sistematis. Olahan dilakukan dengan menuliskan wawancara, hasil observasi, mengedit, mengklasifikasikan, dan mereduksi, menyajikan data dan menyimpulkan data. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis data interaktif. Proses analisis ini secara singkat akan mengikuti tahapan sebagai berikut; data yang terkumpul direduksi berupa pokok-pokok temuan yang relevan dengan bahan penulisan, dan selanjutnya disajikan secara naratif. Reduksi dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan secara bersamaan dalam melakukan pengumpulan data. Proses selanjutnya adalah proses penarikan kesimpulan, dilakukan setelah proses pengumpulan data., yakni dilakukan setelah proses pengumpulan data, disajikan, didiskripsikan dan kemudiandiberi pemaknaan dengan interpretasi logis. Dengan proses ini sasaran akhirnya adalah untuk mendapatkan sejumlah makna.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Geografi dan administrasi: Dari segi geografis, Lombok sebagai pulau kecil adalah bagian dari Nusa Tenggara Barat (NTB), yang luasnya mencapai sekitar 4738,7 km² atau sekitar 24% dari luas Provinsi NTB. Secara administratif, pulau

Lombok terbagi dalam lima wilayah administratif, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Berdasarkan luasnya, maka Kabupaten Lombok Timur adalah kabupaten terluas, yang kemudian diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat (Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Luas Daerah Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota 2010

Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1. Pulau Lombok		
Lombok Barat	1053,92	5,23
Lombok Tengah	1208,40	6,00
Lombok Timur	1605,55	7,97
Lombok Utara	809,53	4,02
Kota Mataram	61,3	0,30
Total	4738,7	24,00
2. Pulau Sumbawa		
Sumbawa	6643,98	32,97
Dompu	2324,6	11,53
Bima	4389,4	21,78
Kota Bima	207,5	1,03
Sumbawa Barat	1849,02	9,17
Total	15414,5	76,00
Total NTB	20153,2	100,00

Sumber: NTB Dalam Angka 2011

Topografi dan Iklim: Dari segi topografi dan kondisi alam, Lombok relatif berbeda dengan Sumbawa. Lombok secara umum memiliki karakteristik topografis dan kondisi alam yang menunjang bagi berkembangnya usaha pertanian intensif. Kondisi daerah ini lebih subur dan hijau dibanding Sumbawa. Keberadaan Gunung Rinjani yang memiliki ketinggian 3.726 mdpl secara dominan mempengaruhi iklim dan aktifitas pertanian, dan menjadikan Lombok berbeda dari Sumbawa. Kondisi hutan dan sumber air di Gunung Rinjani mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dan lingkungan pada seluruh kabupaten di pulau Lombok. Hulu dari hampir semua sungai yang berada di kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota Mataram adalah berada di kaki atau kawasan Gunung Rinjani. Kondisi ini menjadikan Lombok sebagai daerah yang relatif subur dan lebih memungkinkan untuk berkembangnya sektor pertanian, termasuk dalam

pengelolaan usaha peternakan sapi secara intensif. Ketersediaan pakan dan hijauan makanan ternak, khususnya untuk sapi, relatif lebih tinggi di pulau Lombok. Hal ini pula yang membedakan sistem pengelolaan usaha peternakan di Lombok dan Sumbawa, dimana pengelolaan usaha peternakan di Lombok cenderung dilakukan lebih intensif (dikandangan) sedangkan di Sumbawa cenderung ekstensif (dilepas di padang penggembalaan).

Suhu rata di pulau Lombok adalah 28°C dengan kisaran 22,8 – 33°C. Data pada tahun 2010 menunjukkan bahwa suhu maksimm terjadi pada bulan Maret dan suhu minimum terjadi pada bulan Juli. Data curah hujan dan hari hujan di pulau Lombok menunjukkan bahwa pada tahun 2010 terjadi hujan sepanjang tahun dengan jumlah hari hujan terendah 12 hari pada bulan Juli dan terbanyak pada bulan Desember dengan jumlah hari hujan 25 hari. Kelembaban di NTB, khususnya di pulau Lombok relatif tinggi, yaitu berkisar 79 – 85%, dengan kecepatan angin rata-rata mencapai kisaran 6 – 7 knots dan kecepatan maksimum mencapai 25 knots.

Penggunaan Lahan dan Sektor Pertanian: Lombok dicirikan oleh kondisi pertanian intensif dengan luas areal pertanian mencapa 127.597 ha (Tabel 4.2). Sebagian besar lahan pertanian dapat ditanami dengan tanaman pangan tiga kali dalam setahun dengan komoditi utama padi dan palawija. Pada beberapa daerah areal pertanian dapat dan cocok untuk ditanami tanaman perkebunan, khususnya tembakau. Lombok Timur dan sebagian dari daerah Lombok Tengah adalah daerah yang dominan mengembangkan tanaman tembakau. Lombok bagian selatan dan sebagian dari Lombok bagian utara dikenal sebagai daerah yang cenderung lebih kering dibanding dengan Lombok di bagian tengah, dan sistem pertanian di kedua kawasan ini sedikit agak berbeda. Di kawasan yang relatif kering ini tidak terjangkau oleh aliran air sungai yang bersumber dari gunung Rinjani. Dengan keterbatasan air seperti ini, kawasan Lombok bagian Selatan dan sebagian dari kawasan Lombok Utara dicirikan oleh sistem pertanian lahan kering atau pertanian tadah hujan. Pada tempat-tempat seperti ini usaha pengembangan ternak sapi relatif lebih sulit dibandingkan dengan kawasan Lombok bagian tengah – khususnya terkait dengan penyediaan pakan dan hijauan makanan ternak.

Tabel 4.2. Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Pulau Lombok 2010

Kabupaten/Kota	Sawah
Lombok Barat	16754
Lombok Tengah	54562
Lombok Timur	45717
Lombok Utara	8289
Kota Mataram	2275
Total	127.597

Sumber: NTB Dalam Angka 2011

Dari segi peternakan, data menunjukkan bahwa sapi menjadi salah satu ternak utama atau dominan di pulau Lombok. Data pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa di tahun 2010 populasi ternak sapi di pulau Lombok mencapai 314.223 ekor, dan sapi menjadi jenis ternak ruminanti utama yang ada dan dikelola petani di Lombok (bandingkan dengan populasi kerbau dan kuda, yang masing-masing hanya berjumlah 32.499 dan 12.840 ekor).

Tabel 4.3. Populasi Sapi Bali menurut Kabupaten di Pulau Lombok 2010

Kabupaten/Kota	Sapi	Kerbau	Kuda
Pulau Lombok			
Lombok Barat	61 728	4 829	6 422
Lombok Tengah	59 947	99 172	6 219
Lombok Timur	62 801	0 586	5 504
Lombok Utara	59 651	6 100	557
Kota Mataram	2 128	40	816
Total	223 314	99 324	40 128
Pulau Sumbawa			
Sumbawa	797 156	35 545	36 374
Dompu	89 748	99 173	5 673
Bima	25 917	16 362	98 101
Kota Bima	81 167	0 217	1 283
Sumbawa Barat	36 415	85 130	2 658
Total	728 381	405 123	82 637
Total NTB	951 695	904 155	22 766

Sumber: NTB Dalam Angka 2011

Demografi: Data statistik tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di pulau Lombok mencapai 3.2 juta jiwa atau sekitar 70,4 % dari total penduduk NTB (BPS NTB, 2011). Sebaran penduduk pada 5 kabupaten kota di Lombok disajikan pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4. Sebaran Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Pulau Lombok 2010

Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Penduduk k	Kepadatan	% Penduduk
Pulau Lombok				
Lombok Barat	105 3,92	599 986	5 69,29	1 3,33
Lombok Tengah	120 8,4	860 209	7 11,86	1 9,11
Lombok Timur	160 5,55	110 5582	6 88,60	2 4,57
Lombok Utara	809, 53	200 072	2 47,15	4 ,45

Kota Mataram	61,3	843	402	6	8
				571,66	,95
Total	8,7	473	316	6	7
Pulau					
Sumbawa					
Sumbawa	3,98	664	415	6	9
		789		2,58	,24
Dompu	4,6	232	218	9	4
		973		4,20	,87
Bima	9,4	438	439	1	9
		228		00,07	,76
Kota Bima	5	207,	142	6	3
		579		87,13	,17
Sumbawa Barat	9,02	184	114	6	2
		951		2,17	,55
Total	14,5	154	133	8	2
Total NTB	53,2	201	450	2	1
		0212		23,30	00

Sumber: NTB Dalam Angka 2011

Data pada Tabel 4.4. memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Lombok Timur relatif lebih tinggi dibanding dengan kabupaten lainnya, dan kabupaten yang jumlah penduduknya paling rendah adalah Lombok Utara, yaitu sejumlah 200.072 jiwa atau hanya 4,45% dari total jumlah penduduk NTB di tahun 2010. Tingkat kepadatan penduduk juga lebih tinggi di kabupaten Lombok Timur dan paling rendah adalah kabupaten Lombok Utara. Sesuai dengan karakteristik dan kondisi alamnya, maka sebagian besar penduduk di pulau Lombok adalah bekerja dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.

2. Profil Pariwisata NTB

Sebagai tujuan utama pariwisata syariah di Indonesia, pulau lombok semakin populer baik dalam negeri maupun di mancanegara. Berikut ini merupakan profil pariwisata pulau lombok yang menjadi potensi terbesar dalam pengelolaan pariwisata di Pulau Lombok khususnya dan NTB secara umum. Sebagai sebuah destinasi pariwisata, pulau Lombok memiliki dua atraksi wisata andalan, yakni keindahan wisata alam dan keunikan budaya masyarakatnya. Lombok memiliki wisata alam yang tersebar di seluruh bagian pulau, mulai dari ketinggian Gunung Rinjani hingga hamparan pantai di sekelilingnya. Alam Lombok tidak hanya menyajikan pemandangan dan topografi seperti pantai, gunung, air terjun, sungai, dan danau, tetapi juga peristiwa alam yang tidak

ditemukan di destinasi lain. Peristiwa alam unik yang hanya terjadi di Lombok antara lain munculnya nyale, sejenis cacing laut, setiap musim hujan di pantai selatan; munculnya kelompok ikan pari manta di pantai barat dan utara setiap pergantian musim; keindahan matahari terbit dan matahari tenggelam dari puncak Rinjani; serta berbagai keunikan peristiwa alam di sekitar Gunung Rinjani.²⁸

Kombinasi alam dan budaya menciptakan keunikan atraksi wisata yang merupakan produk pariwisata Lombok. Lombok memiliki sumber daya alam yang sangat potensial untuk memenuhi permintaan para wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Dengan dua wilayah yang memiliki vegetasi alam yang kontras, Lombok bagian utara dan tengah lebih hijau dan subur dibandingkan bagian selatan. Vegetasi Lombok utara dan tengah sangat dipengaruhi oleh Gunung Rinjani. Gunung dengan tinggi 3.726 m ini merupakan pusat kehidupan berbagai spesies flora dan fauna di Lombok. Catatan sejarah dan kajian geologi mengindikasikan bahwa gunung Rinjani pernah mengalami letusan yang sangat dahsyat sekitar tahun 1257. Efek letusan Gunung Rinjani tersebut memberikan berkah tersendiri berupa kesuburan tanah dan panorama alam yang luar biasa, yang kini menjadi salah satu atraksi wisata alam utama di Lombok, yaitu Danau Segara Anak.

Bagian selatan Lombok memiliki vegetasi yang lebih kering namun dihiasi dengan hamparan pantai pasir putih yang memanjang dari timur sampai ke barat. Kontur Lombok selatan yang berbukit-bukit menciptakan relief yang indah dan bentuk teluk yang unik. Selain hamparan pantai dengan karakteristik yang beragam untuk berbagai aktivitas olahraga air, Lombok selatan juga memiliki desa-desa tradisional yang masih dihuni oleh suku Sasak dengan tradisi nenek moyang dan kearifan lokal yang masih dijaga dengan sangat baik. Kesemuanya menyajikan rangkaian atraksi wisata yang berbeda dari destinasi-destinasi wisata lainnya. Bagian kekayaan alam yang menjadi daya tarik wisata di Lombok antara lain:

a. Produk Pariwisata

Lombok memiliki sumber daya alam yang sangat potensial untuk memenuhi permintaan para wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Dengan dua wilayah yang memiliki vegetasi alam yang kontras, Lombok bagian utara dan tengah lebih hijau dan subur dibandingkan bagian selatan. Vegetasi Lombok utara dan tengah sangat

²⁸ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah NTB, Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok tahun 2015-2019, p. 20

dipengaruhi oleh Gunung Rinjani. Gunung dengan tinggi 3.726 m ini merupakan pusat kehidupan berbagai spesies flora dan fauna di Lombok. Catatan sejarah dan kajian geologi mengindikasikan bahwa gunung Rinjani pernah mengalami letusan yang sangat dahsyat sekitar tahun 1257. Efek letusan Gunung Rinjani tersebut memberikan berkah tersendiri berupa kesuburan tanah dan panorama alam yang luar biasa, yang kini menjadi salah satu atraksi wisata alam utama di Lombok, yaitu Danau Segara Anak.

Bagian selatan Lombok memiliki vegetasi yang lebih kering namun dihiasi dengan hamparan pantai pasir putih yang memanjang dari timur sampai ke barat. Kontur Lombok selatan yang berbukit-bukit menciptakan relief yang indah dan bentuk teluk yang unik. Selain hamparan pantai dengan karakteristik yang beragam untuk berbagai aktivitas olahraga air, Lombok selatan juga memiliki desa-desa tradisional yang masih dihuni oleh suku Sasak dengan tradisi nenek moyang dan kearifan lokal yang masih dijaga dengan sangat baik. Kesemuanya menyajikan rangkaian atraksi wisata yang berbeda dari destinasi-destinasi wisata lainnya. Bagian kekayaan alam yang menjadi daya tarik wisata di Lombok antara lain:

Pantai, potensi pariwisata pantai di pulau lombok khususnya merupakan primadona dan paling populer di antara destinasi-destinasi lainnya. Sebut saja misalnya Pantai Senggigi merupakan destinasi pantai pertama dan paling banyak disebut oleh para pelancong yang berkunjung di pulau lombok, keindahannya pantai dan panoramanya dengan latar belakang Gunung Agung Bali menjadi nilai lebih dari destinasi ini. Hotel-hotel memenuhi sepanjang bibir pantai, dengan pemandangan yang sangat indah, terutama pada saat matahari terbenam.

Pantai yang terletak kurang lebih 5 Km dari kota Tua Ampenan ini, memiliki panjang sekitar tiga puluh kilometer. menyuguhkan berbagai pesona alam yang menakjubkan. Mulai dari pasir pantainya yang makin ke utara makin putih, serta jajaran pohon kelapa yang menjulang tinggi dan melambai ketika tersapu angin senggigi yang lembut yang memebelai dan menyayukan mata sehingga tak jarang anda akan merasakan sensasi nyaman ketika disini.

Tak hanya itu, mata juga di suguhkan dengan pemandangan karang laut yang kokoh beserta dengan variasi tumbuhan dan hewan laut yang menghuninya. Sungguh panorama yang begitu memanjakan mata. Dengan adanya pemandangan bawah laut tersebut, wisatawan bisa menikmati wisata bawah laut dengan cara snorkeling. Tak hanya itu, karena keindahan alam Pantai Senggigi Lombok memiliki ombak dengan alun yang bagus ,olahraga laut seperti sky sering di lakukan oleh para wisatawan mancanegara.

Bicara mengenai destinasi pantai, pulau Lombok memiliki beberapa referensi pantai yang cukup indah dan tak kalah dengan destinasi yang serupa yang berada di pulau-pulau lainnya. Sebut saja misalnya pantai Kuta, walau tidak seperti pantai Kuta Bali, namun pesona keasriannya tidak kalah dengan pantai Kuta Bali. Cermikan pula dengan pantai-pantai yang berada disekitar Gili, seperti Gili Meno dan Gili Trawangan. Keindahannya telah termasyhur hingga ke manca negara.

Sebagai sebuah destinasi pariwisata, pulau Lombok memiliki dua atraksi wisata andalan, yakni keindahan wisata alam dan keunikan budaya masyarakatnya. Lombok memiliki wisata alam yang tersebar di seluruh bagian pulau, mulai dari ketinggian Gunung Rinjani hingga hamparan pantai di sekelilingnya. Alam Lombok tidak hanya menyajikan pemandangan dan topografi seperti pantai, gunung, air terjun, sungai, dan danau, tetapi juga peristiwa alam yang tidak ditemukan di destinasi lain. Peristiwa alam unik yang hanya terjadi di Lombok antara lain munculnya nyale, sejenis cacing laut, setiap musim hujan di pantai selatan; munculnya kelompok ikan pari manta di pantai barat dan utara setiap pergantian musim; keindahan matahari terbit dan matahari tenggelam dari puncak Rinjani; serta berbagai keunikan peristiwa alam di sekitar Gunung Rinjani.

Lombok selatan memiliki hamparan pantai pasir putih sejauh lebih dari 90 km, yang memanjang dari timur sampai ke barat daya. Hamparan pantai tersebut berada di antara lekukan kaki gunung dan cerukan bukit yang menghadirkan pemandangan yang mempesona. Keistimewaan pantai di Lombok tak hanya pada pasir putihnya yang kadang diselingi warna lainnya, namun juga pada keheningan yang masih terpelihara. Di beberapa tempat, topografi pantai yang sedemikian rupa menciptakan arus dan gelombang yang tepat untuk olahraga selancar, menyuguhkan lebih dari sekedar sand and sun. Dengan cuaca yang relatif stabil dan matahari yang bersinar sepanjang tahun, pantai-pantai di kawasan selatan Lombok sangat layak dijadikan produk wisata unggulan dan berdaya saing bagi kepariwisataan Lombok.

Untuk *wisata laut*, Lombok memiliki ratusan pulau kecil dengan pantai berpasir putih, dan air yang sejernih kristal. Setiap pulau kecil memiliki titik penyelaman dengan jenis karang dan ikan yang unik, selain untuk melakukan aktivitas sand, sun, surfing and fishing. Selain kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan wisata laut dan pantai, pulau-pulau kecil tersebut memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi destinasi olahraga air.

Petualangan Alam, Gunung Rinjani telah lama dikenal sebagai sentra destinasi tersendiri di Lombok. Berbagai aktivitas pariwisata petualangan, sightseeing, penelitian

dan pendidikan, kesehatan, serta soft and hard trekking dapat dilakukan di sini. Keistimewaan lainnya yaitu danau Segara Anak yang terdapat di kawah gunung ini pada ketinggian 2.008 meter di atas permukaan laut. Gunung Rinjani banyak mempengaruhi terjadinya berbagai obyek wisata alam seperti air terjun, sungai, dan hutan lindung dengan berbagai flora dan fauna endemik yang berada di dalamnya, termasuk keunikan hayati bawah laut di sekitar Pulau Lombok dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya.

Atraksi budaya Lombok terdiri dari tempat, benda dan gelaran acara budaya. Walaupun masyarakat Lombok mayoritas beragama Islam, namun budayanya banyak dipengaruhi pula oleh budaya Hindu. Ini terlihat dari peninggalan bangunan tempat ibadah. Terdapat banyak pura dan masjid tua peninggalan abad ke 16 dan 17 di Lombok yang hingga kini masih dijadikan tempat ibadah oleh masyarakat sekitar. Pengaruh Hindu dan Islam juga terlihat pada berbagai ritual gelaran acara budaya yang dilakukan oleh masyarakat Lombok dari waktu ke waktu. Berbagai jenis tarian, permainan, musik tradisional, serta filosofi yang dimiliki masyarakat Lombok merupakan refleksi dari ajaran Hindu dan Islam yang dipelihara secara harmonis oleh masyarakat Lombok secara turun temurun. Keunikan budaya Lombok merupakan keunggulan lain yang patut dibanggakan. Desa-desanya tradisional yang masih terjaga keasriannya di bagian selatan dan utara pulau Lombok masih menerapkan gaya hidup bersahaja seperti yang diwariskan oleh generasi terdahulu mereka, termasuk dalam menyajikan berbagai tarian tradisional, musik, permainan dan karnaval tradisional, seperti nyongkolan.

Kerajinan, Lombok memiliki lima produk kerajinan unggulan yang mendukung pariwisata. Kelima produk kerajinan tersebut terpusat di lima kabupaten/kota seperti yang terlihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 1:

Produk lokal andalan Pariwisata Lombok

Produk	Desa	Kabupaten /Kota
Kain tenun songket	Desa Sukarara	Lombok Tengah
	Desa Suwela	Lombok Timur
Gerabah	Desa Banyumulek	Lombok Barat
	Penujak	Lombok Tengah

	Penakak	Lombok Timur
Cukli	Labuapi	Lombok Barat
	Sayang-Sayang	Mataram
Kuliner	Mataram	Mataram
Mutiara	Sekarbela	Mataram

Semua produk kerajinan tersebut, kecuali mutiara, adalah barang kerajinan yang sudah diproduksi sejak jaman dahulu, jauh sebelum industri pariwisata dikembangkan di Lombok.

b. Daya Tarik Wisata

Empat kelompok produk pariwisata yang dimiliki Lombok, seperti tersebut diatas, tersebar di lima kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Sebagian besar dari produk wisata tersebut adalah obyek wisata yang belum dibangun dan dikembangkan dengan optimal. Obyek-obyek wisata unggulan yang menjadi produk wisata Lombok seperti dijelaskan di atas antara lain dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Wilayah	Jenis Pariwisata			
	Pariwisata Pantai	Laut	Alam di Darat	Tempat Budaya
Lombok Timur	Senggigi, Mekaki, Bangko-bangko	Gili Gede Gili Nanggu	Pusuk Monkey Forest, Hutan Sesaot	Desa Banyumulek, Suranadi, Narmada, Karang Bayan
Lombok Tengah	Kuta, Tanjung Aan, Selong Belanak, Mawun, Gerupuk		Air terjun Benang setokel, Kelambu, Rinjani	Desa Sukarara, Penujak, Sade

Lombok Barat	Pantai Pink, Pantai Surga	Gili Sudak Lampu Tangkong	Tete Batu, Air Terjun Kembang Kuning, Rinjani	Desa Suwela, Penakak
Lombok Utara	Pantai Sepi	3 Gili	Rinjani, Air Terjun Sindang Gile	Desa tradisional Senaru dan Segenter
Mataram				

3. Kelembagaan Pariwisata NTB

Pengelolaan pariwisata tidak akan berhasil dan maju apabila tidak ikut melibatkan berbagai pihak. Pemerintah harus bahu membahu dengan berbagai pihak dalam menata dan mengembangkan pariwisata, baik secara nasional maupun daerah. Peraturan daerah adalah salah satu instrumen, akan tetapi kelembagaan pariwisata menjadi sangat penting diperhatikan dan bekerja bahu membahu dalam memajukan pariwisata.²⁹ Lembaga-lembaga ini selanjutnya menjadi pilar utama pariwisata di tanah air. Berikut ini adalah beberapa kelembagaan pariwisata di Pulau Lombok;

a. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)

PHRI merupakan salah satu dari kelembagaan pariwisata di Indonesia, tugas dan fungsinya adalah membina badan usaha yang bergerak pada bidang-bidang jasa akomodasi/Perhotelan, Jasa Makanan/Resorotan, Lembaga Pendidikan Pariwisata. Di samping itu peran dari PHRI adalah ikut serta dalam pengembangan dan memajukan industri pariwisata, serta meningkatkan mutu dan layana kepariwisataan baik secara nasional maupun daerah.

PHRI memiliki kepengurusan dari tingkat nasional sampai daerah tingkat dua/kabupaten/kota. Masing-masing daerah memiliki program kerja yang mengarah kepada kepentingan pengembangan kepariwisataan.³⁰

b. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia

²⁹ Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata Pasal 29, Dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pariwisata di wilayahnya masing-masing.

³⁰ <http://www.phrionline.com/visi-misi-phri/> diakses pada tanggal 16 September 2018. Data juga disesuaikan dengan hasil wawancara dengan Ketua PHRI NTB pada tanggal 9 Oktober 2018

Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia yang di dalam Bahasa Inggris juga dikenal dengan Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) adalah suatu perkumpulan yang mewadahi pengusaha atau pelaku usaha di bidang jasa perjalanan wisata di Indonesia. Sebagai organisasi yang bertujuan sosial nan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang kepariwisataan Indonesia, ASITA mempunyai lima fungsi strategis untuk kemajuan industri pariwisata Indonesia.

c. Himpunan Peramu Wisata Indonesia

HPI – Himpunan Pramuwisata Indonesia or Indonesian Tourist Guide Association (ITGA) is a non profit, non political association which groups together, around Indonesia Republics, a Licensed and Individual Tourist Guides, Honorary Members who have direct attention with Tourist Guide Professionalism. The HPI's main purpose is to group, promote and ensure that tourist guides are recognized as the ambassadors of their country.

Besides HPI purposes to be active in research and tourism development, and as the vehicle to voice out their members' guide fees and social welfares. HPI offers services to our members but also communicates to those in search of the services of professional area specific tourist guides and where to hire them, as well as actively to promote our members' professionalism to industry partners worldwide.³¹

d. Kementerian Pariwisata Indonesia

Sebagai lembaga Pemerintah dan menjadi representasi pemerintah baik di daerah maupun di Pusat, Kementerian pariwisata memiliki peran yang cukup penting dalam pengembangan industri pariwisata. Kedudukannya dalam kelembagaan pariwisata adalah sebagai legulator dan pengambil kebijakan terhadap pengembangan pariwisata dan pengelolaan destinasi.

Di daerah Kementrian pariwisata diperankan oleh kantor-kantor Dinas Pariwisata daerah Propinsi dan daerah kabupaten/Kota.

Selain tiga kelembagaan tersebut di atas masih ada beberpa lembagay nag secara peran memiliki fungsi kelembagaan dalam pengembangan pariwisata secara nasional maupun kedaeraahan atau lokal.

4. Kerangka Peraturan dan Pengaturan Pariwisata Halal NTB

³¹ <https://hpijakarta.wordpress.com/about-himpunan-pramuwisata-indonesia/> diakses pada tgl 16 September 2018

Dalam rangka ikut mendukung dan mensukseskan pengembangan pariwisata halal di NTB, maka pemerintah daerah propinsi telah menetapkan beberapa peraturan daerah (PERDA) terkait dengan penyelenggaraan pariwisata halal. PERDA tersebut adalah sebagai berikut;

Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Perda ini ditetapkan di Mataram pada tanggal 21 Juni 2016 dan ditanda tangani oleh Kepala Daerah saat itu, yaitu HM. Zainul Majdi.

PERDA ini terdiri dari beberapa bab dan bagian serta berisi beberapa pasal. Secara keseluruhannya adalah sebagai berikut;

Pada bab pertama, PERDA tersebut merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang nilai penting dan penjelasan beberapa istilah kunci dalam PERDA yang dimaksud. Poin yang paling penting dalam ketentuan umum di atas adalah sebagai berikut;

- a. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.
- b. Sertifikat adalah fatwa tertulis yang diberikan oleh DSN -MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.
- c. Usaha Jasa Perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- d. Usaha Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
- e. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa; hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
- f. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalan wisata.
- g. Usaha Salus Per Aquan yang selanjutnya disebut Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- h. Atraksi Wisata adalah obyek - obyek wisata berupa tempat maupun aktivitas yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi tersebut.

Dua point pertama dalam pasal satu PERDA ini, menjelaskan pariwisata halal dan kedudukan fatwa DSN-MUI dalam penyelenggaraan pariwisata halal di NTB. Sisanya menjelaskan beberapa jenis usaha yang terkait dalam penyelenggaraan pariwisata halal.

Pada pasal kedua PERDA ini mengatur tentang tujuan dari diterbitkannya PERDA Pariwisata Halal. Di mana peraturan ini dimaksudkan untuk Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan. Di samping itu peraturan ini juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan layanan pariwisata halal, sebagaimana disebutkan pada pasal tiga.

Pada bagian kedua dari peraturan ini, menjelaskan ruanglingkup dari pariwisata halal, yang meliputi;

- a. Destinasi
- b. Pemasaran
- c. Industri
- d. Kelembagaan
- e. Pembinaan, dan
- f. Pembiayaan

Destinasi yang dimaksudkan dalam pasal 6 bagian kedua peraturan ini adalah atraksi, wisata alam, dan budaya. Kemudian juga diatur tentang kewajiban pengelola destinasi untuk menyediakan fasilitas umum bagi kenyamanan aktifitas kepariwisataan halal. Fasilitas umum yang dimaksud adalah tempat ibadah dan perlengkapannya serta tempat bersuci.

Bab ketiga dan keempat dari peraturan daerah ini berisi tentang kebijakan pengembangan dan promosi pariwisata halal.

Sedangkan pada bab kelima, peraturan ini mengatur perihal kewajiban industri pariwisata konvensional. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Arah kiblat dalam setiap kamar
- b. Informasi Masjid terdekat
- c. Tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim
- d. Keterangan tentang produk halal/tidak halal
- e. Tempat wudlu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan
- f. Sarana pendukung untuk melaksanakan sholat

- g. Urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Bagian kedua dari bab lima peraturan ini mengatur perihal Industri pariwisata halal adalah usaha - usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip - prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Industri pariwisata halal yang dimaksud adalah sebagai berikut;

- a. Akomodasi
- b. Biro Perjalanan
- c. Restoran
- d. SPA

Industri pariwisata tersebut di atas harus mengikuti ketentuan yang dibuat oleh DSN-MUI. Pada Industri akomodasi minimal sudah memiliki sertifikat dari DSN-MUI. Kriteria syariah dalam akomodasi tersebut meliputi;

- a. Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
- b. Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah
- c. Tersedia makanan dan minuman halal
- d. Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis;
- e. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Selanjutnya pada bagian yang sama, peraturan menjelaskan perihal industri makanan. Di mana industri makanan dalam pengelolaan pariwisata halal harus menyediakan makanan dan minuman bersertifikasi, wajib menjamin kehalalan makanan /minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/nonhalal pada setiap jenis makanan /minuman; dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih. Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN – MUI

Pengaturan juga ditujukan kepada pengelola SPA, dalam industri pariwisata halal, pengelola SPA harus memastikan bahwa ruang pelayanan SPA harus tertutup, wisatawan perempuan harus dilayani oleh terapis perempuan, demikian pula dengan pelanggan laki-laki harus dilayani oleh terapis laki-laki. Selanjutnya pengelola SPA harus menyediakan fasilitas ibadah bagi pelanggan dan karyawan. Terhadap bahan-bahan yang digunakan

dalam terapi SPA, pengelola SPA harus memastikan seluruhnya berlabel halal, seperti bahan yang digunakan untuk spa, rempah, masker, aroma terapinya harus berlogo halal dan dipastikan halal.

Industri terakhir yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah industri perjalanan wisata. Ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha industri perjalanan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal
- b. Menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (code of conduct) pada destinasi pariwisata halal; dan
- c. Menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengacu ketentuan DSN-MUI

Peraturan daerah tentang pariwisata halal ini diakhiri dengan bab dan bagian yang mengatur tentang pengawasan, pembinaan, dan pelaporan serta pembiayaan. Secara umum peraturan ini merupakan perangkat pendukung bagi terwujudnya pariwisata halal di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Instrumen Pariwisata Syariah NTB

Memperhatikan serta mencermati peraturan daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal tersebut di atas, maka dapat dipetakan beberapa instrumen penting dalam penyelenggaraan pariwisata halal di Pulau Lombok. Instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut;

- a. Destinasi, sebagai bagian paling penting dalam pengelolaan industri pariwisata. Hidup dan matinya sebuah industri pariwisata sangat bergantung dengan destinasi. Destinasi adalah objek yang ditawarkan dalam pengelolaan industri pariwisata. Semakin besar dan luas destinasi, semakin semakin ramai pula industri pariwisatanya,
- b. Pelaku Industri pariwisata halal, dalam konteks penyelenggaraan pariwisata halal di Pulau Lombok pelaku industri pariwisata halal menjadi instrumen aktif dan penting. Pelaku industri ini meliputi sebagai berikut:
 - a) Akomodasi
 - b) Penyedia Jasa makanan/Resoran
 - c) Pengusaha Jasa Perjalanan Wisata

- d) SPA
- c. Instrumen yang paling penting adalah pedoman syariah, pedoman syariah ini merupakan tolak ukur dari penyelenggaraan pariwisata halal. Tolak ukurnya adalah standar yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pariwisata halal di pulau lombok. Standar yang dimaksud adalah sebagai berikut;
 - a) Fatwa DSN-MUI
 - b) Sertifikat Halal MUI
 - c) Sertifikat DSN-MUI
 - d) Sarana Pendukung Ibadah bagi Wisatawan/Pelanggan

6. Pola Pengembangan Pariwisata Syariah di Pulau Lombok

Membaca dan mengamati pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok, dari sisi teori Inovasi dan teori maqasid asy-syariah, maka dapat dikatakan bahwa pengembangan pariwisata halal hanya merupakan perluasan potensi pasar belaka, tanpa ada inovasi yang nyata. Di mana tidak terdapat kebaruan dalam pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok. Pada sisi destinasi misalnya, tidak ada destinasi yang baru yang dikembangkan oleh Pemerintah, walaupun ada pembangunan baru, yaitu Islamic Center, tetapi bangun IC tersebut tidak berfungsi sebagai destinasi, akan tetapi sekedar sebagai fasilitas pendukung peribadatan semata. Hal ini terlihat dari kelengkapan IC dan pola pengelolaannya.

Semestring kalau menjadi sebuah destinasi, maka IC bisa berfungsi sebagai pusat informasi dan pameran ataupun menjadi museum Islam Lombok dan NBT. Kemudian dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung akomodasi dan tempat makan. Maka dari kacamata Teori inovasi yang dikembangkan oleh Schumpeter, di mana inovasi dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, di mana inovasi dapat mempengaruhi keuntungan dalam bisnis dan inovasi dapat menimbulkan proses imitasi dalam dunia bisnis.

Sedangkan dari kacamata teori maqasid asy-syariah, secara umum maqasid asy-syariah yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah maqasid yang dikembangkan oleh Jassier Audah. Pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok telah masuk pada kerangka kerja teori Jasser Audah, di mana segala bentuk konsepsi yang dihasilkan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil pengamatan serta analisis penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa pola pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok mengarah kepada pariwisata ramah muslim, tidak mengembangkan destinasi dan objek tujuan wisata baru yang mencerminkan kebaruan dalam pengelolaan pariwisata halal.

Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi Halal Tourism telah mendeklarasikan diri sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur (PERGUB) Nusa Tenggara Barat No. 51 Tahun 2015 Tentang Wisata Syariah. PERGUB ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan dalam berwisata sesuai dengan konsep usaha halal tourism yang merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selain dari pada itu Pemerintah NTB juga

mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

Halal tourism dalam kontek PERGUB dan PERDA NTB di atas adalah sebagai salah satu bentuk pengelolaan pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar syariah. Pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan-kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan pengaturan tersebut seluruh bentuk kegiatan pariwisata, baik fasilitas pendukung maupun layanan sudah semestinya tunduk dan mengacu kepada kedua peraturan yang ada.

Selama rentang waktu 2016 hingga awal 2018 grafik kunjungan wisatawan di Pulau Lombok melonjak sangat signifikan, dampak dari kampanye pariwisata halal di NTB cukup mampu mendokrak tingkat kunjungan wisatawan dan cukup signifikan memberikan kontribusi pendapatan asli daerah, pada satu sisi. Namun pada sisi yang lain konsepsi pariwisata halal dalam PERDA baru sebatas TAG-LINE semata, di mana pemahaman konsep ini belum secara merata dapat dipahami oleh seluruh pelaku pariwisata. Sosialisasi dan upaya memberikan pemahaman yang tepat kepada seluruh komponen belum dilakukan secara masif.

Pola pengembangan pariwisata halal yang dapat dijumpai di Pulau Lombok saat ini adalah lebih kepada pengelolaan pariwisata yang ramah muslim atau muslim friendly. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa aspek, sebagai mana data yang diperoleh, pada aspek pengelolaan destinasi; fasilitas pendukung peribadatan menjadi point utama dalam pengelolaan destinasi, belum ada pengembangan destinasi sebagai upaya untuk menginterpretasikan PERDA yang ada. Pada aspek pengelolaan perjalanan wisata, pariwisata halal yang diupayakan adalah bagaimana kewajiban individu wisatawan muslim itu dapat dipelihara dengan baik. Sedangkan pada sisi infrastruktur pendukung seperti hotel dan restoran, masih banyak yang belum mengadaptasi PERDA sebagai acuan dalam pembangunan fisik dan fasilitas lainnya.

2. Rekomendasi

Agar tercipta iklim pariwisata halal, sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat, maka perlu upaya untuk tidak menjadikan Pulau Lombok sebagai destinasi ramah muslim, akan tetapi bisa mewujudkan destinasi yang bercirikan Islam. Sebagai salah satu contoh adalah dengan menghadirkan Kampung Muslim sebagai salah satu bentuk miniatur kehidupan keberagaman masyarakat Pulau Lombok (di luar Islam Waktu Telo tentunya)

Perlu upaya bersama, baik pemerintah daerah maupun kelembagaan pariwisata lainnya untuk ikut secara bersama-sama melakukan upaya yang serius dalam mengembangkan pariwisata halal di Pulau Lombok Khususnya dan NTB secara umum.

Daftar Pustaka

- Anshari, Yusak, *Manajemen Strategi Hotel (Strategi Meningkatkan Inovasi dan Kinerja)*, (Surabaya: ITS Press, 2010), hal 1. Lihat juga Prof. Jan Hendrick Peters dkk, *Hospitality in Motion State The Art on Service Management*, (Jakarta: Gramedia, 2003)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2007)
- Choakaew, S. , Chan, O., Chartarawat, J., Spriprasert, P., & Nimpaya, S., “Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country”, *Jurnal Of Economics Business and Management* 3(7) 739-741. Doi:10.7763/JOEBM, 2015.V3.277
- Jaelani, Aan. “Halal Tourism Industry in Indonesia”, dalam Munich Oersonal PcPec Archive MOPA, [www. Ideas.repec.org/f/pja475](http://www.Ideas.repec.org/f/pja475)
- Leksono, Sony. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta; Rajawali Press, 2013)

- Mujib, Abdul, “Analisis Terhadap Konsepsi Syariah Pada Industri Perhotelan di Indonesia”, dalam Jurnal Asy-Syir’ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta edisi Desember 2016
- , “Dinamika hukum dan Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia” dalam Jurnal Al-Ahkam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Sanga Semarang Jawa Tengah Edisi 2014
- , “Interpretasi Norma Fiqh Pada Produk Perbankan Syariah Indonesia”, dalam Preceding Book International Konference on Muamalat and Islamic Finance, Selangor: UKM, 2009
- Sulistiyono, Agus, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, Bandung: Al-Fatah, 2011
- Steadmon, C.E. dkk, *Managing Front Office Operations*, Michigan: Edicational Institute of Amerocan for Hotel and Motel Association, 1990
- Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Qur’an al-Karim; Bunyatuhu at-Tasyri’iyat wa Khashishuhu al-Hadharayat*, edisi terjemah oleh Muhammad Lukman Hakim dkk, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013. Tentang Standar Usaha Perhotelan
- Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI., Nomor PM.106/PW.0066/MPEK/2011 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Industri Perhotelan.
- Naskah Paparan Deputi Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Ekonomi/Bapenas
- Bank Muamalat Indonesia, Peraturan Perusahaan dalam Laporan Tata Kelolaan Perusahaan Tahun 2014, www.bankmuamalat.co.id/download/file/gcg-report-tahun-2014_20160214201357.pdf. Akses 27 September 2016
- Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam Team DSN-MUI, Kumpulan Fatwa-Fatwa DSN-MUI 2015